

**Peran Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita
dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

di Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 1992-2004

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Medi Firdaus

Nomor Mahasiswa : 02313112

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

**Peran Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita
dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 1992-2004**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Medi Firdaus

Nomor Mahasiswa : 02313112

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di Kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 23 Juni 2006

Penulis,

Medi Firdaus

PENGESAHAN

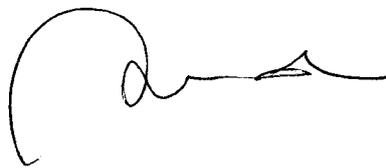
**Peran Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita
dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 1992-2004**

Nama : **Medi Firdaus**
Nomor Mahasiswa : **02313112**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Yogyakarta, 23 Juni 2006

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Sahabudin Sidiq, Drs., MA

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrohiim....

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peran Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1992-2004”***. Skripsi ini secara garis besar memuat seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya :

1. Bapak Sahabudin Sidiq, Drs., MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs, asmani Ishak, M. Bus., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Jaka Siryana M.si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Gambar.....	xii
Halaman Daftar Tabel.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan penelitian.....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM.....	13
2.1. Kondisi Wilayah.....	15
2.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Tasikmalaya.....	16
2.3. Wilayah Administrasi dan Pemerintahan.....	16
2.4. Kependudukan.....	18
2.5. Ketenagakerjaan.....	20
2.6. Perkembangan Industri di Kabupaten Tasikmalaya.....	21
2.7. PDRB dan Struktur Perekonomian.....	23
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	25
3.1. Sektor Pariwisata di Kabupaten Klaten Kurang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	25
3.2. PAD Kabupaten Gunung Kidul Berpengaruh Positif Terhadap Otonomi.....	26
3.3. Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap PAD di Kota Tasikmalaya.....	26
3.4. Pengelolaan Sumber-sumber Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.....	27
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS.....	29
4.1. Kesenjangan antar Daerah.....	29

4.2. Hakikat Otonomi Daerah.....	32
4.3. Daya Tarik Otonomi Daerah.....	37
4.4. Otonomi Pada Dasarnya Adalah Federalisme.....	38
4.5. Pertumbuhan Ekonomi.....	49
4.6. Pendapatan Asli Daerah.....	42
4.7. Teori Tentang pembangunan Industri.....	42
4.8. Teori Perangkap Penduduk Maltus.....	44
4.9. Pengertian PDRB.....	44
4.10. Hipotesis.....	45
BAB V METODE PENELITIAN.....	46
5.1. Metode Penelitian.....	46
5.1.1. Jenis dan Sumber Data.....	46
5.1.2. Definisi Variabel.....	46
5.2. Metode Analisis Data.....	48
5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil.....	48
5.2.2. Pemilihan Model Regresi.....	48
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
6.1. Analisis Hasil regresi dan Pengujian Hipotesis.....	56
6.1.1. Pemilihan Model Regresi.....	56
6.1.2. Hasil Regresi.....	57

6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2).....	57
6.1.4. Pengujian T-Statistik.....	58
6.1.5. Pengujian F-Statistik.....	62
6.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	63
6.2.1. Autokorelasi.....	63
6.2.2. Heteroskedastisitas.....	64
6.2.3. Multikolinearitas.....	66
6.3. Penyembuhan Multikolinearitas dengan Menghilangkan Variabel Dummy.....	67
6.3.1. Hasil Regresi.....	67
6.3.2. Koefisien Determinasi (R^2).....	67
6.3.3. Pengujian T-statistik.....	68
6.3.4. Pengujian F-statistik.....	71
6.4. Pengujian Asumsi Klasik.....	72
6.4.1. Autokorelasi.....	72
6.4.2. Heterokedastisitas.....	74
6.4.3. Multikolinearitas.....	75
6.5. Interpretasi Hasil Regresi.....	76
6.5.1. Konstanta atau Intersep.....	76
6.5.2. Jumlah Industri.....	76
6.5.3. Jumlah Penduduk.....	76
6.5.4. Produk Domestik Regional Bruto.....	77

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	79
7.1. Simpulan.....	79
7.2. Implikasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
5.1. Statistik Durbin-Watson.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. PAD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1992-2004.....	6
1.2. PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2000-2003.....	8
2.1. Batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.....	15
2.2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya.....	16
2.3. Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah.....	17
2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk 1992-2004.....	19
2.5. Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001.....	20
2.6. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001.....	21
2.7. Jumlah Perusahaan Industri Besar / Sedang.....	23
2.8. PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1998-2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, Menurut Lapangan Usaha.....	24
5.1. Uji Statistik Durbin-Watson.....	53
6.1. Hasil Uji MWD.....	56
6.2. Hasil Uji T-Statistik.....	59
6.3. Hasil Uji LM.....	64

6.4. Hasil Uji White Test.....	65
6.5. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	66
6.6. Hasil Uji T-Statistik.....	69
6.7. Hasil Uji LM.....	73
6.8 Hasil Uji White Test.....	74
6.9. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	75

DAPTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data Perkembangan PAD Kab. Tasikmalaya (1992-2004), Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per kapita dan Otonomi Daerah.....	84
II. Hasil Regresi Linier.....	85
III. Hasil Regresi Log-Linier.....	85
IV. Hasil Uji MWD Dengan Model Linier.....	86
V. Hasil Uji MWD Dengan Model Log-Linier.....	86
VI. Hasil Uji LM Untuk Meneteksi Autokorelasi.....	67
VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heteroskedastisitas.....	88
VII. Hasil Untuk Mendeteksi Multikolinearitas.....	89
IX. Hasil Regresi Linier.....	91
X. Hasil Regresi Log-Linier.....	91
XI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi.....	92

Abstraksi

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan, bagi suatu daerah yang ingin maju. Demikian juga Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, semua pembangunan ini dilaksanakan sebaik mungkin agar cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah berupaya menggali segala potensi yang ada di daerahnya sehingga hasil pemanfaatannya dapat dirasakan merata diseluruh daerahnya, dengan demikian perlu diupayakan keselarasan dan kesinambungan antara berbagai sektor yang terkait sehingga pembangunan dilaksanakan di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah tersebut.

Dari tahun ketahun jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah terutama kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan

kesempatan kerja baru sangat terbatas. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Selain itu pemerintah kabupaten Tasikmalaya harus lebih memperhatikan sektor-sektor dominan diantaranya sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan agar PDRB menunjukkan peningkatan yang lebih besar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara statistik positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka akan meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dari pos-pos Pendapatan Asli Daerah. Selain itu variabel PDRB secara statistik positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. PDRB dapat diartikan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan sebagai tingkat kekayaan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Dengan semakin tingginya PDRB maka tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Demikian pula kemampuan mereka dalam membayar pajak, restribusi daerah juga semakin meningkat. Sehingga nantinya pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya dapat ditingkatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan, bagi suatu negara yang ingin maju. Demikian juga Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, semua pembangunan ini dilaksanakan sebaik mungkin agar cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses berencana dari suatu situasi menuju ke situasi Nasional yang dinilai lebih baik. Telah ditegaskan dalam GBHN bahwa “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuannya adalah terbinanya kesetabilan politik serta kesatuan bangsa, untuk itu diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara yang diarahkan pada

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasil diseluruh tanah air.

Ditingkat regional upaya ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah berupaya menggali segala potensi yang ada di daerahnya sehingga hasil pemanfaatannya dapat dirasakan merata diseluruh daerahnya, dengan demikian perlu diupayakan keselarasan dan kesinambungan antara berbagai sektor yang terkait sehingga pembangunan dilaksanakan di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tentunya tidak lepas dari keberhasilan pembangunan didaerah. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini di mana perhatian pemerintah semakin meningkat terhadap pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan dilimpahkan kepada daerah. Peranan keuangan daerah akan semakin penting, karena daerah dituntut lebih aktif dalam memobilisasikan dananya sendiri dan mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Dengan demikian, untuk merealisasikan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana guna membiayai pemerintahannya. Berhubungan dengan hal tersebut Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU. No 33 Tahun 2004 terdiri dari : (Kuncoro, 2004):

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Dana Perimbangan,
- (c) Pinjaman daerah dan
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- (a). Pajak Daerah
- (b). Restribusi Daerah,
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Selain konsep otonomi daerah diatas, hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan PAD adalah konsep pembangunan industri. Konsep pembangunan industri seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi, oleh karena itu seringkali dianggap sama. Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok

kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara “horizontal” semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran /periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Sehingga nantinya akan tercipta peluang kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat. Maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan industri yang ada. Dan diharapkan dengan pembangunan industri tersebut maka akan tersedia lapangan kerja di kabupaten Tasikmalaya sehingga nantinya perekonomian bisa tumbuh sesuai dengan

yang diharapkan. Selain itu pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya juga bisa ditingkatkan, ini dikarenakan dengan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat maka kemampuan mereka membayar pajak juga akan meningkat sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya juga meningkat.

Untuk menunjang keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya maka harus diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya, beberapa faktor tersebut antara lain adalah faktor administrasi dan faktor non administrasi. Faktor administrasi yang mempengaruhi antara lain keefektifan penentuan penetapan, keefektifan pemungutan, dan kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan variabel non administrasi yang mempengaruhi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan sebagainya. (Jeny Aan Listiawan, 2001).

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat kita lihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut perkembangan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Misalnya saja pada tahun 1992, besarnya PAD adalah Rp. 5.380.487 ribu rupiah naik menjadi Rp. 6.572.064. Demikian seterusnya perkembangan PAD kabupaten Tasikmalaya sampai tahun 2000 terus mengalami kenaikan. Dan pada tahun tersebut adalah jumlah tertinggi dari PAD sebelum adanya otonomi daerah, yaitu sebesar Rp.14.842.527 ribu rupiah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 1992-2004 (ribu rupiah)

Tahun	PAD
1992	5.380.487
1993	6.572.064
1994	7.808.078
1995	8.987.081
1996	1.0701.137
1997	1.1894.855
1998	1.3299.015
1999	1.3977.405
2000	14.842.527
2001	25.306.071
2002	9.565.733
2003	18.659.211
2004	20.568.895

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Tetapi setelah diterapkannya sistem otonomi daerah yang berlaku mulai tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah melonjak drastis yaitu mencapai angka Rp. 25.306.071 ribuan rupiah dan hal itu tentu saja dikarenakan sebagian besar pendapatan daerah benar-benar dialokasikan di daerahnya masing-

masing dan dana yang masuk ke pemerintah pusat hanya beberapa persen saja. Sementara itu otonomi daerah juga membawa dampak terhadap penurunan PAD kabupaten Tasikmalaya. Ini dikarenakan terjadi pemekaran wilayah pemerintahan menjadi pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kabupaten sehingga pendapatan daerah yang semula dialokasikan di daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagian dialokasikan ke Pemerintahan Kota Tasikmalaya sehingga besarnya PAD kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2002 hanya sebesar Rp. 9.565.733 ribu rupiah, jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai Rp.25.306.071 ribu rupiah penurunannya sangat jauh sekali. Namun pada tahun 2003 dan 2004 PAD Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan besarnya adalah Rp.18.659.211 ribu rupiah dan Rp.20.568.895 ribu rupiah.

Konsep otonomi daerah juga tidak terlepas dari peran PDRB atau pendapatan perkapita. Sesuai konsep yang digunakan, pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung neto ditambah arus pendapatan dari luar Kabupaten Tasikmalaya.

Data penyusun, pajak tak langsung dan arus pendapatan, pada saat ini belum dapat dihitung. Sehingga kita asumsikan pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan pada tahun bersangkutan yang belum tentu pendapatan tersebut seluruhnya diterima masyarakat itu.

Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB perkapita di Kabupaten Tasikmalaya lihat tabel 1.2

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2000-2003 (juta rupiah)

Tahun	Kabupaten Tasikmalaya	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga konstan (1993)
2000	2.456.376,92	1982.846
2001	2.553.390,19	663.737
2002	2.883.929,89	696.909
2003	3.096.904,13	723.234

Sumber: BPS Tasikmalaya

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Tasikmalaya atas harga berlaku setahun sebelum diberlakukannya otonomi daerah yaitu tahun 2000 sebesar Rp. 2.456.376,92 setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.553.390,19 begitu juga selama waktu 2001-2003 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 212.974,24 atau sebesar 7,38 persen. Namun atas dasar harga konstan sebelum diberlakukannya otonomi daerah besarnya adalah Rp.1.982.846 juta rupiah.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, besarnya PDRB pada tahun 2001 turun menjadi Rp.663.737 juta rupiah. Tetapi pada tahun berikutnya PDRB atas dasar harga konstan terus mengalami kenaikan, Rp.696.909 juta rupiah pada tahun 2002 dan Rp.723.234 juta rupiah pada tahun 2003

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
4. Apakah kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
5. Apakah jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB serta kebijakan otonomo daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah industri terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk mengetahui apakah jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB serta kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- b. Penelitian ini sangat bermanfaat dalam usaha untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah dan sistematis berdasarkan ilmu atau teori yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- c. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
- d. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian yang diambil dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai gambaran secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dua bagian: *pertama*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi

landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Kedua*, hipotesis merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional kebijakan pembangunan daerah menyarankan adanya keselarasan terhadap laju pertumbuhan antar daerah, pemerataan antar daerah, dan pemberian bobot otonomi daerah yang seluas-luasnya. Atas dasar itu, maka secara efektif pelaksanaan desentralisasi fiskal di berlakukan sejak 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (kemudian revisi menjadi UU No.33 tahun 2004). Undang-Undang ini merefleksikan pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan yang lebih luas kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan fungsinya (*local discretion*).

Desentralisasi memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan *desain* menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, risiko paling besar adalah ketika sumber utama penerimaan Pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa diikuti langkah-langkah kebijaksanaan yang menjamin mobilisasi pendapatan daerah untuk membiayai berbagai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan

masyarakat melalui kebijakan pengeluaran sektor publik, serta kebijakan fiskal dan desain sumbangan pemerintah pusat kepada daerah. Untuk itu, tulisan ini akan mengelaborasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan dilema yang ada dalam pelaksanaannya.

Implikasi langsung fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi, sistem transfer, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sistem pembiayaan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang selama ini berlaku. Dengan kebijaksanaan tersebut sistem pembiayaan daerah menjadi sangat jelas.

Sementara itu, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditunjuk untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi tersebut dan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan SDA yang disebut dengan bagian daerah. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan pajak yang dibagi hasilnya yaitu pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sedangkan penerimaan sumber daya alam

(SDA) yang dibagi hasilnya adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dana bagi hasil dimaksud diakui akan menyebabkan variasi antar daerah karena didasarkan atas penghasilan daerah sehingga menguntungkan daerah-daerah tertentu. Namun demikian, variasi antar daerah tersebut dapat diantisipasi melalui DAU yang diberikan dan didesain dengan mempertimbangkan sisi kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah. Dengan kata lain, DAU ditunjuk untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga semua daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya.

2.1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara geografis berada di sebelah tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas wilayah :

Tabel 2.1

Batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Sebelah Utara	Kab. Majalengka, Ciamis, Kota Tasikmalaya
Sebelah Barat	Kab. Garut
Sebelah Timur	Kab. Ciamis
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Secara geografis terletak antara $107^{\circ} 56' \text{ BT}$ - $108^{\circ} 8' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 10' \text{ LS}$ - $7^{\circ} 49' \text{ LS}$ dengan jarak membentang Utara Selatan terjauh 75 Km dan arah Barat Timur 56,25 Km. Luas keseluruhan sebesar $2.563,35 \text{ Km}^2$. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian antara 0 – 1.500 m diatas

permukaan laut yang membentang dari arah utara dan yang terendah kearah selatan. Sebagian kecil wilayahnya yaitu 0,81 % berada pada ketinggian diatas 1.500 m, keadaan iklim umumnya bersifat tropis dan beriklim sedang dengan rata-rata suhu di dataran rendah antara 20°-34° C dan di dataran tinggi berkisar 18°-22° C. Curah hujan rata-rata 2,072 mm/tahun, jumlah hari hujan rata-rata 82 hari.

2.2. Penggunaan lahan Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan data BPS di Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah keseluruhan sebesar 2.563,35 Km², yang terbagi ke dalam berbagai macam penggunaan lahan dan dapat dilihat di tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya (%)

Penggunaan Lahan	Persentase
Kebun	42,45 %
Sawah	18,30 %
Perumahan	16,18 %
Hutan	13,52 %
Ladang	8,29 %
Danau	1,26 %

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

2.3. Wilayah Administrasi dan Pemerintahan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas 2.563,35 Km² yang terbagi menjadi 39 Kecamatan dan 348 desa dan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa (buah)
1	Cipatujah	242,65	14
2	Karangnunggal	136,10	14
3	Cikalong	136,96	13
4	Pancatengah	199,05	11
5	Cikatomas	132,63	9
6	Cibalong	58,35	6
7	Parungponteng	47,23	8
8	Bantarkalong	59,63	8
9	Bojongasih	35,09	5
10	Culamega	58,04	5
11	Bojonggambir	148,36	10
12	Sodonghilir	97,11	12
13	Taraju	55,53	9
14	Salawu	50,47	12
15	Puspahiang	33,19	8
16	Tanjungjaya	36,37	7
17	Sukaraja	43,14	8
18	Salopa	120,78	9
19	Jatiwaras	77,39	10
20	Cineam	77,69	10
21	Karangjaya	47,85	4
22	Manonjaya	39,49	12
23	Gunungtanjung	32,31	7
24	Singaparna	18,82	10
25	Mangunreja	26,65	6
26	Sukarame	15,58	6
27	Cigalontang	119,13	16
28	Leuwisari	44,60	7
29	Padakembang	30,15	5
30	Sariwangi	40,85	8
31	Sukaratu	33,41	8
32	Cisayong	48,33	13
33	Sukahening	23,80	7
34	Rajapolah	15,38	8
35	Jamanis	14,99	8
36	Ciawi	42,23	11
37	Kadipaten	43,26	6
38	Pagerageung	63,37	10
39	Sukaresik	17,39	8
	Jumlah	2.563,35	348

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

2.4. Kependudukan

Dari tahun ketahun jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah terutama kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas.

Sebagai akibat dari dua keadaan yang bertentangan diatas, maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan masalah-masalah seperti : struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin meningkat, urbanisasi, dan sebagainya. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1992 jumlah penduduk kabupaten Tasikmalaya adalah 1.816.054 jiwa, naik menjadi 1.817.506 jiwa pada tahun 1993. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi terjadi tahun 2000 yaitu mencapai 1.971.014 jiwa. Tetapi pada tahun 2001 jumlah penduduk kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 1.535.859 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini terjadi karena adanya pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya. Ada dua kecamatan yang semula ikut kabupaten Tasikmalaya sekarang menjadi bagian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun tahun pada tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan lagi menjadi

1.572.562 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 1992-2004

Tahun	Jumlah Penduduk
1992	1.816.054
1993	1.817.506
1994	1.820.351
1995	1.823.183
1996	1.896.546
1997	1.905.421
1998	1.916.615
1999	1.919.759
2000	1.971.014
2001	1.535.859
2002	1.572.562
2003	1.606.711
2004	1.616.102

2.5. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001 sebesar 5,69 %. Tingkat pengangguran terbuka perempuan 7,30 % lebih besar dari tingkat pengangguran terbuka laki-laki yaitu 5,02 %. Sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki mencapai 71,49 % lebih besar daripada tingkat partisipasi kerja perempuan yaitu 29,02 %, yang dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2001

Jenis Kelamin	Kegiatan Utama							Jumlah
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah	Sekolah	Mengurus RMT	Lainnya	Jumlah	
Laki-laki	427.059	597.925	449.649	86.202	23.611	69.524	179.337	628.986
Perempuan	170.866	13.455	184.321	97.745	346.006	7.162	450.913	635.234
Total	597.925	36.045	633.970	183.947	369.617	76.686	630.250	1.264.220
Pengangguran terbuka (%)								
Laki-laki	5,02							
Perempuan	7,30							
Total	5,69							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK - %)								
Laki-laki	71,49							
Perempuan	29,02							
Total	50,15							

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Struktur ketenagakerjaan penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Tasikmalaya yaitu, penduduk yang bekerja sector pertanian mencapai 41,13 %, kemudian di sector perdagangan 20,15 %, sedangkan di sector industri 19,09 %, dan sector-sektor lainnya masih dibawah 10 %,

Tabel 2.6
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001

No	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pertanian	175.234	70.711	245.945	41,13
2	Pertambangan & Usaha	2.407	0	2.407	0,40
3	Industri	64.952	49.217	114.169	19,09
4	Listrik, Gas & Penggalian	617	0	617	0,11
5	Konstruksi	14.598	0	14.598	2,44
6	Perdagangan	90.705	29.775	120.480	20,15
7	Angkutan & Komunikasi	38.422	617	39.039	6,53
8	Keuangan	1.851	0	1.851	0,31
9	Jasa	38.270	20.544	58.814	9,84
	Jumlah	427.056	170.864	597.920	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

2.6. Perkembangan Industri di Kabupaten Tasikmalaya

Industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-

lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran /periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Sehingga nantinya akan tercipta peluang kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat. Pada tahun 1992 jumlah industri di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 114, sedangkan pada tahun 1993 terjadi penurunan jumlah industri menjadi 104 industri. Demikian seterusnya pada tahun 1994 jumlah industri yang ada hanya 96 industri.

Namun pada tahun 1995 jumlah industri yang ada mengalami kenaikan lagi menjadi 106 industri. Kenaikan tersebut terjadi sampai 1997 yang mencapai 107 industri. Pada tahun 1998 jumlah industri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan lagi hingga pada tahun 2004 hanya mencapai 23 industri. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah industri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Perusahaan Industri Besar / Sedang
Tahun 1992-2004

Tahun	Jumlah Industri
1992	114
1993	104
1994	96
1995	106
1996	108
1997	107
1998	91
1999	80
2000	51
2001	26
2002	24
2003	26
2004	23

2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang akan memberikan gambaran keadaan atau kondisi yang terjadi di daerah-daerah, sehingga dapat dijadikan dasar atau landasan perencanaan serta kebijakan yang akan diambil. Struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang besarnya sumbangan dari masing-masing sektor

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1. Sektor Pariwisata di Kabupaten Klaten Kurang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah

Penelitian (skripsi) karya Nugroho Afrianto (2002), dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000”* dari analisis itu dapat dihasilkan kesimpulan bahwa:

- a. Pada sektor pariwisata Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Klaten. Hal itu terjadi karena ada beberapa obyek wisata yang mampu menyerap pengunjung yang cukup besar tetapi tidak dipungut bea masuk (retribusi) sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, dan terdapat beberapa wajib retribusi yang tidak memperpanjang ijin usahanya yang sudah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.
- b. Di kabupaten klaten keberadaan Industri besar dan sedang belum memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Klaten.

3.2. PAD Kabupaten Gunung Kidul Berpengaruh Positif Terhadap Otonomi

Penelitian (skripsi) karya Wahyu Dwisaputra (2002), dengan judul *“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah”* (suatu penelitian di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Dari analisisnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul tiap tahun selalu meningkat yang merupakan kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Namun, besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dikontribusikan guna Otonomi Daerah masih kecil dan menyebabkan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya belum dapat mencapai apa yang diharapkan atau dengan kata lain masih jauh dari Otonomi Daerah yang mandiri.

3.3. Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap PAD di Kota Tasikmalaya

Penelitian yang dilakukan oleh Ahman Syah (2001) seorang cendekiawan dari Tasikmalaya, menyebutkan bahwa Adanya pemekaran wilayah di Tasikmalaya menjadi 2 Wilayah menyebabkan PAD yang semula dikelola sebagian besar oleh Pemerintahan Kabupaten beralih ke Pemerintahan Kota, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai lebih dari 580.000 jiwa mengambil hampir 70 persen potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya. Potensi yang dimaksud adalah pajak dan retribusi dari hotel, rumah makan, rumah sakit, terminal bus beserta sentral perindustrian bordil di Kecamatan Kawalu yang setiap minggu

beromzet sekitar Rp 7 miliar. Pemkab harus menyerahkan berbagai potensi PAD itu kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya karena letaknya di dalam wilayah Kota Tasikmalaya. Baru terbetuknya Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Pemerintah setempat merasa dituntut untuk menaikkan target PAD yang tujuannya untuk lebih mengembangkan Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju dan mampu bersaing, tetapi rencana menaikkan target PAD tersebut dinilai sebagian kalangan membebani masyarakat yang semula Rp 29, 937 miliar menjadi Rp 32,069 miliar yang sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan prediksi kenaikan sumber PAD yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih relatif kecil, hanya sekira Rp 599,239 juta, dari semula Rp 856,056 juta menjadi Rp 1,455 miliar.

3.4. Pengelolaan Sumber-sumber Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Subiyanto Mengenai Pengelolaan Keuangan daerah menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan asli daerah pada dasarnya terkait dengan dinamika perekonomian lokal yang penggunaannya harus dikembalikan kepada pembayar pajak maupun retribusi (tax payer). Pajak daerah terdiri dari pajak hotel dan restoran sebesar Rp.10,1 Milyar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 105% dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya Rp.4,9 Milyar. Peningkatan secara drastis dapat

diciptakan melalui intensifikasi pemungutan pajak sehingga para pembayar pajak melunasi kewajibannya dengan tertib. Hal ini bisa dicapai sejak Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan peraturan daerah mengenai Pajak Hotel dan Restoran yang di dalam perda tersebut mengandung sistem pemungutan yang berkeadilan.

Selain itu, di Kabupaten Sleman dipungut berbagai amcam retribusi yang meliputi 15 item, seperti retribusi pelayanan kesehatan, sampah/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penggunaan kekayaan daerah, jasa usaha terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi, penjualan produksi usaha daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, IMB, ijin gangguan dan ijin trayek. Total retribusi daerah ini mencapai 25% dari PAD. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman menempatkan retribusi sebagai suatu beban perseorangan yang dilayani oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pembebanan kepada masyarakat didasarkan kepada beban biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kebijakan ini berakibat penyesuaian tarif didasarkan pada perkembangan harga-harga yang berlaku sehingga penyesuaian tarif cukup dengan Keputusan Bupati. Di sisi lain, strategi kebijakan pemungutannya ditetapkan dalam perda dan untu pendapatan dari Laba Badab Usaha Milikk Daerah (BUMD) sebesar 15 persen dari PAD itu sendiri dan 5 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman di dapatkan dari pendapatan lain-lain sebesar 5 persen. (www.clgi.or.id)

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Kesenjangan antar Daerah

Salah satu tantangan pembangunan di masa mendatang yang harus diwaspadai adalah persoalan kesenjangan ini. Khususnya kesenjangan antar daerah yang mau tidak mau berkaitan dengan dua jenis ketimpangan lainnya. Betapa tidak. Di tengah arus globalisasi yang membuat batas-batas negara kian tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, arus informasi tidak terbendung, dan kesadaran akan nilai universal kian tak terelakan. Justru masih dijumpai berbagai praktik yang menempatkan praktik yang menempatkan daerah-daerah sebagai suatu unit, setidaknya unit ekonomi, yang terpisahkan satu sama lain.

Pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir sebelum terjadinya krisis ternyata, justru masih saja meninggalkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama jakarta dan sekitarnya. Kira-kira dua pertiga Nasional dinikmati oleh Jawa dan lebih dari empat perlima bertengger di kawasan Barat Indonesia. Jika dengan memakai indikator yang paling kasar saja yaitu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kondisi ketimpangan ini sudah demikian parah, tentu akan lebih timpang lagi jika menggunakan indikator kesejahteraan. Sekalipun demikian, kita perlu lebih berhati-hati untuk memilih indonesia menjadi dua kawasan

(KBI dan KTI) semata-mata dari besaran PDRB, agar kita tidak kehilangan jejak dalam memahami hakikat permasalahannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada kecenderungan pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa dan kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun, tampaknya masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ketimpangan antar daerah semakin membaik. Sebab, PDRB Cuma mengindikasikan perkembangan penduduk atau *output* di suatu daerah dan menaikkan nilai tambah (*value-added*) yang dihasilkan dari proses produksi tersebut yang dinikmati oleh pemilik faktor-faktor produksi yang berada diluar daerah yang bersangkutan. Misalnya, PT Freeport di Irian Jaya, sudah pasti sangat sedikit pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Irian Jaya jika dengan di bandingkan dengan kekayaan alam yang diambil dari situ. Belum lagi, jika dihitung kerusakan alam yang ditimbulkan dari eksploitasi emas dan tembaga oleh perusahaan itu. Ini tidak berarti bahwa manfaat yang seharusnya dinikmati oleh setiap daerah harus setara dengan kekayaan alamnya. Namun, sebaliknya, teramat naif untuk terus mempertahankan format strategi dan kebijakan pembangunan antardaerah yang berlangsung hingga kini, dengan alasan klise bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.

Salah satu ciri utama negara kesatuan ialah kekuasaan atau *authority* yang besar pada pemerintah pusat. Kehidupan bernegara dipompakan dari pusat dengan kelengkapan aparatur yang sangat berpengaruh dan menentukan. Sistem dan mekanisme perencanaan cenderung sangat

sentralitis serta di tandai berbagai pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Pemerintah daerah praktis cuma jadi perpanjangan tangan dari pusat.

Namun, intensitas dominasi pusat dari satu ke lain Negara kesatuan tentu berbeda-beda. Perbedaan intensitas ini ternyata tidak berkorelasi sangat kuat dengan ideologi yang dianut. Tetap, lebih dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya apolitik, serta lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu negara. Jadi, sekalipun menganut negara kesatuan, pengelolaan negara oleh pemerintah pusat bisa saja bersifat dinamis. Yang penting bagaimana penyelenggaraan pemerintahan bisa berlangsung secara efisien dan efektif untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan lebih merata.

Sementara itu, belakangan ini trend di berbagai penjuru dunia untuk lebih banyak memberi wewenang pada daerah (tingkat pemerintahan yang lebih rendah) di hampir segala hal. Kecenderungan ini bukan merupakan gejala latah yang tidak memiliki landasan kuat. Hal ini sudah menjadi tuntutan zamanyang ditandai oleh munculnya permasalahan yang sangat rumit dan multidimensional di tingkat daerah dengan keunikannya masing-masing. Permasalahan ini tidak mungkin diatasi dengan satu terapi tunggal dan seragam yang bersifat nasional, terpusat, sektoral, dan departemental. juga semakin disadari bahwa *span of control* pemerintah pusat ada batasnya, yang kalau dilampaui akan menciptakan berbagai pihuh

(*distortions*) dan inefisien. Tetapi, sudah tentu beberapa fungsi pemerintahan yang vital dan membawa panji negara mutlak di tangan pemerintah pusat.

Bagi Indonesia, bentuk negara kesatuan merupakan amanat konstitusi. Semangat kesatuan dan persatuan melekat kental pada bangsa Indonesia. Namun, tatkala menghadapi krisis seperti sekarang ini, terbukti bahwa semangat itu lebih sebagai slogan yang cenderung dijadikan “kedok” oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan roda pemerintahan. Jargon kesatuan dan persatuan dalam beberapa hal cenderung dijadikan tameng bagi sementara elit politik sebagai pembenaran atas berbagai tindakan yang menekan. Semangat kesatuan dan persatuan pula yang melandasi pelaksanaan pemerintah di daerah sesuai Undang-undang No 5/1974. UU ini menggariskan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Undang-undang No 32 dan No 33 tahun 2004 memang telah jauh lebih maju dalam memberikan ruang gerak bagi daerah, namun tampaknya belum cukup untuk menghadapi ancaman disintegrasi yang kian mengangu. (Faisal Basri 2004)

4.2. Hakikat Otonomi Daerah

Hakikat otonomi daerah adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku

dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai terselenggaranya *social order*. Di luar ini, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang persaingan antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.

Kini kita dihadapkan pada keadaan yang tidak normal. Pertimbangan akademis dan teknis saja menjadi tidak memadai. Kita berpacu dengan waktu untuk membayar kompensasi dalam keterlambatan dalam menyerap aspirasi daerah yang tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah Orde Baru. Agaknya akselerasi pemberian otonomi yang hakiki harus segera dimanifestasikan. Memang untuk mewujudkan tidaklah mudah. Utang luar negeri yang menggelembung cenderung membuat pemerintah pusat enggan memberikan keleluasaan yang memadai dalam pengaturan kembali sumber-sumber penerimaan negara. Namun, persoalan ini hendaknya tidak dijadikan argumen untuk membuat gerak otonomi dalam ketidakpastian.

Belakangan ini, banyak kerancuan dalam menanggapi persoalan munculnya ancaman disintegrasi bangsa. Akar masalahnya, boleh jadi disebabkan oleh cara memahami perubahan mendasar pada lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan paradigma lama. Pola pikir yang kaku dan cenderung menyakralkan simbol-simbol tertentu mencerminkan resistensi sementara kalangan terhadap tuntutan perubahan yang merupakan suatu keniscayaan (hukum alam atau sunnatullah).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini masih bisa diperdebatkan. Apakah perundang-undangan yang berlaku justru membingkai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; ataukah justru peraturan perundang-undangan yang harus menyesuaikan diri dengan hakikat dari otonomi itu sendiri. Untuk menghilangkan kerancuan atas persepsi di atas kiranya perlu untuk memahami hakikat atau makna filosofis dari prinsip keotonomian.

Pada tingkat terendah otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari *free will* yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta. *Free will* inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom (*autonomy of individual*) sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada didalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul dengan kemamouan untuk mengaktualisasikan potensi keunikannya secara optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa individu-individu yang otonom menjadi model dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki, oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku

dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level playing of field*.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proporsi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.

Sayangnya, semangat dari undang-undang No. 32/2004 lebih mengacu pada proporsi kedua, sehingga pada dasarnya undang-undang tersebut dilandasi oleh semangat dekonsentrasi, bukan otonomi. Lebih disayangkan lagi, UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah yang oleh banyak kalangan dipandang sudah cukup maju, bahkan sementara kalangan memandang cenderung sangat liberal tidak diimbangi oleh perubahan mendasar dalam

rangka penguatan kemampuan daerah dalam aspek pendanaan sebagaimana ditawarkan oleh UU Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah. Padahal, kesatuan arah dan gerak kedua undang-undang ini merupakan prasyarat yang nyaris mutlak untuk mewujudkan otonomi daerah yang hakiki. Alasan yang diajukan oleh perumus RUU perimbangan Keuangan Pusat-Daerah adalah karena perubahan harus dilakukan secara bertahap, karena segala sesuatunya sumber daya manusia, administrasi, dan lain-lain harus disiapkan dengan matang sebelum kewenangan yang lebih jauh diberikan kepada daerah. Alasan efisien inilah yang membuat jenis-jenis penerimaan negara masih dikelola oleh pemerintah pusat. Sayangnya, tidak ada formula yang jelas dan pasti bagi alokasi daerah.

Ketidakserasian gerak langkah kedua UU patut dipertanyakan. Sepatutnya sebelum diajukan ke DPR, pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan RUU telah memiliki kesamaan visi sehingga harmonisasi kedua RUU tersebut sudah dilakukan sejak proses awalnya. Bahkan, idealnya kedua UU ini dijadikan satu, sehingga lebih menjamin padunya substansi demi pemberdayaan daerah.

Jika proporsi pertama yang menjadi acuan untuk pemberdayaan daerah, maka tidak ada alasan yang membuat munculnya kesan kuat bahwa pemerintah pusat masih setengah hati memberikan otonomi penuh kepada daerah sebagaimana tercermin dari ketidakserasian gerak langkah kedua UU tatkala sedang dibahas di DPR. Ketidakserasian kedua UU akan menimbulkan banyak komplikasi bagi pengaturan berbagai aspek kehidupan

ekonomi dan politik, karena kedua UU tersebut akan menjadi acuan bagi pengaturan-pengaturan lainnya yang lebih spesifik, seperti; pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan negara-negara tetangga terdekat, dan penanaman modal.

4.3. Daya Tarik Otonomi Daerah

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak misalnya, yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber (*factor endowment*). Namun, ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terrealisasikan.

Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global:

1. Terjamin pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang, dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen nonekonomi.
2. Proses politik yang menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik. Dalam kaitan inilah sangat penting untuk meninjau kembali Undang-undang No. 33/2004 bersama Undang-undang politik terbaru secara simultan, untuk betul-betul menegakkan pilar-pilar bagi tegaknya

otonomi mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi. Sebagai pelengkap, perlu pula dibuat undang-undang yang mengatur pemerintah pusat.

3. Tegaknya *good governance* baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN baru.
4. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan ekonomi dikendalikan oleh batas-batas wilayah.
5. Fleksibilitas sistem insentif.
6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur

4.4. Otonomi Pada Dasarnya adalah Federalisme

Otonomi yang hakiki hanya memiliki pijakan yang kuat dalam negara federal. Keotonomian daerah memungkinkan daerah mengeksplotasikan keunikan masing-masing semaksimal mungkin sehingga memiliki keunggulan komparatif, dan bahkan keunggulan absolut, di dalam kancah persaingan global. Mengingat otonomi yang hakiki, niscaya akan memberikan peluang daerah untuk memiliki tempat di pasar. Semakin mampu suatu daerah menopang bagi terbentuknya kompetensi yang kian kuat di bidang harga dan kualitas pada kalangan pengusahanya, semakin mampu daerah tersebut menyejahterakan rakyatnya lewat pengaktualisasian potensi keunggulan komparatif ataupun keunggulan absolut yang dimilikinya.

Sudah barang tentu, tidak semua daerah akan memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan bebas. Adalah tugas pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah-daerah yang belum mampu memenuhi prasyarat minimum untuk bisa “berdiri sendiri”. Dengan begitu kita bisa berharap globalisasi akan memberikan dampak yang lebih merata dari terjadinya *expansion and dispersion of wealth*, bukannya *concentration of wealth*, sebagaimana yang terjadi selama ini di bawah naungan negara kesatuan yang sangat sentralistik dan eksploitatif.

Trauma Van Mook kelihatannya masih menyelubungi banyak kalangan. Bagi mereka yang terbius traumaini, federalisme identik dengan disintegrasi atau memecah belah persatuan Indonesia. Diskursus kian marak karena kerap pula perbedaan pandangan kerap terjadi di dalam kalangan eksekutif sendiri. Presiden sempat membuka kemungkinan bagi penerapan federalisme, sebaliknya wiranto menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan sudah final. Muncul pilihan lain untuk menangkal disintegrasi, yaitu: otonomi luas dan otonomi penuh. Adapun gagasan dari ketua MPR yang menawarkan format federalisme dalam kerangka negara kesatuan.

Pada umumnya penolakan terhadap federalisme disebabkan oleh dua faktor : **Pertama**, federalisme bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat para pendiri negara, sehingga mengingkari jiwa proklamasi. **Kedua**, ketidak tahuan, atau paling tidak, kerancuan atas konsep federalisme dan beberapa istilah seperti otonomi penuh atau otonomi yang seluas-luasnya. Sejauh ini tidak ada penjelasan yang tuntas tentang seberapa luas otonomi yang akan

siberikan dan seperti apa sosok otonomi penuh itu. Di tengah tuntutan daerah yang semakin keras tentang otonomi, Undang-Undang No. 25/1999 yang bersandingan dengan Undang-undang No. 25/1999 tidak mengandung semangat ekonomi yang kuat, yang pertama mengatur tentang pemerintah di daerah dengan semangat lebih pada asas dekonsentrasi ketimbang otonomi, walaupun harus diakui jauh lebih maju ketimbang Undang-Undang No. 5/1974. adapun Undang-Undang No. 25/1999 yang seharusnya menjadi sandingannya praktis tidak mengubah perimbangan hubungan pusat-daerah sebagaimana nama yang melekat pada undang-undang tersebut.

Setelah diberlakukannya pada tahun 2001, kedua Undang-undang tersebut sudah tidak memadai atau kadaluarsa untuk menjadi aspirasi masyarakat daerah yang kian mengental untuk keluar dari cengkaman pemerintah pusat yang selama ini eksploitatif. kini pemerintah pusat harus berpacu dengan waktu untuk menanggapi tuntutan-tuntutan daerah yang beragam dengan langgam yang berbeda-beda pula.(Faisal Basri 2002).

4.5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. jumlah penduduk
2. Jumlah stok barang modal
3. Luas tanah dan kekayaan alam

4. Tingkat teknologi yang digunakan (sukirno,1985)

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses dapat penekanan karena dapat mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih menyempurnakan makna, hakikat, dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Menurut Rostow teori pertumbuhan ekonomi ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dibuat dalam *Economic Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya *The Stage Of Economic Growth*, 1960. Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan dalam lima tahap yaitu :

1. Masyarakat tradisional (The Traditional Society)
2. Prasarat tinggal landas (The Precondition For Take Off)
3. Tinggal landas (The Take Off)
4. Menuju kedewasaan (The Drive To Manurity)
5. Masa konsumsi tinggi (The Age Of High Mass Consumption)

Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang

terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multi dimensional. Pembangunan ekonomi hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh penurunannya peranan sektor pertanian dan meningkatkan peranan struktur industri saja. (Lincoln Arsyad, 1997)

4.6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah di tingkat II, sebab dana ini benar-benar digali dari daerah itu sendiri dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna menunjang kelancaran pembangunan di daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang syah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainnya.

4.7. Teori Tentang Pembangunan Industri

Teori tentang usaha pembangunan industri salah satunya dipelopori oleh Perroux. Teori Perroux (1970) yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan (*pole of growth*) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di berbagai Negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak

muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang di sebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri pemimpin yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan pemimpin tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Karena industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari system industri yang relative aktif (industri pemimpin) dengan industri-industri yang relative pasif yaitu yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relative maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah lainnya.

Pada hakekatnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah adalah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (permusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi keuntungan-keuntungan tertentu yaitu keuntungan skala ekonomi (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya. (Arsyad , 1999)

4.8. Teori Perangkap Penduduk Malthus

Pada tahun 1798 Revered Thomas Malthus mengemukakan teorinya tentang hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of population* ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing returns*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu Negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret ukur. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten. Oleh karena itu, Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau “kemiskinan absolute” adalah menganjurkan masyarakat untuk “menahan hawa nafsu” (*moral restraint*) dan membatasi keturunannya. (Arsyad, 1999)

4.9. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut K. J Davie, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atas balas jasa kepada sektor produksi di wilayah tersebut. (K. J Davie)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian

suatu wilayah. Dengan mengamati angka-angka Produk Domestik Regional (PDRB) akan dapat diketahui besarnya peranan dari masing-masing sektor perekonomian yang nantinya dapat di ketahui apakah suatu wilayah itu pertanian, industri, jasa dan sebagainya. Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan usaha suatu daerah (regional) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

4.10. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga jumlah industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Diduga jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Diduga PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Diduga Otonomi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
5. Diduga jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB serta kebijakan Otonomi Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian

5.1.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tiga variabel bebas yaitu Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan PDRB serta dummy variabel kebijakan otonomi daerah. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5.1.2. Definisi Variabel

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah di tingkat II, sebab dana ini benar-benar digali dari daerah itu sendiri dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna menunjang kelancaran pembangunan di daerah. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk ribuan rupiah.

b. Jumlah Industri

Adalah keseluruhan jumlah industri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya baik industri besar maupun sedang. Data operasional

yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk buah

c. Jumlah Penduduk

Adalah keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten tasikmalaya. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk jiwa.

d. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Dengan mengamati angka-angka Produk Domestik Regional (PDRB) akan dapat diketahui besarnya peranan dari masing-masing sektor perekonomian yang nantinya dapat di ketahui apakah suatu wilayah itu pertanian, industri, jasa dan sebagainya. Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan usaha suatu daerah (regional) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk juta rupiah.

5.2. Metode Analisis Data

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*ordinary least square*), dengan fungsi Pendapatan Asli Daerah = f (Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan PDRB serta variabel dummy), maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + D_m + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (ribuan rupiah)

X₁ = Jumlah Industri (buah)

X₂ = Jumlah Penduduk (Jiwa)

X₃ = PDRB (jutaan rupiah)

D_m = Dummy variabel untuk melihat adanya pengaruh otonomi daerah terhadap penerimaan daerah.

D_m = 0 (sebelum adanya otonomi daerah)

D_m = 1 (setelah adanya otonomi daerah)

β₀ = Konstanta regresi

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

e = Kesalahan pengganggu

5.2.2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, white and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier. Persamaan

matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linier → $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$
- Log Linier → $\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 Dm + e$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

H_0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H_1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1 .
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2 .
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 z_1 + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier.

5. Estimasi persamaan berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha_3 \ln x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 Z_2 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono ; 2005)

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian :

a. Uji T Statistik

Uji T statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

(Gujarati ; 1999).

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

$$H_0 : \beta_i \leq 0$$

$$H_a : \beta_i > 0$$

b. Jika Hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_i \geq 0$$

$$H_a : \beta_i < 0$$

2. Pengujian satu sisi

Jika $T_{\text{tabel}} \geq t_{\text{hitung}}$, H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $T_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$, H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Gujarati ; 1999)

b. Uji F statistik

Pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut : (Gujarati; 1999).

$H_0 : \beta_i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

H_0 diterima (tidak signifikan) jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} (df = n - k)$

H_0 ditolak (signifikan) jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (df = n - k)$

Dimana :

K : Jumlah variabel

N : Jumlah pengamatan

c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.

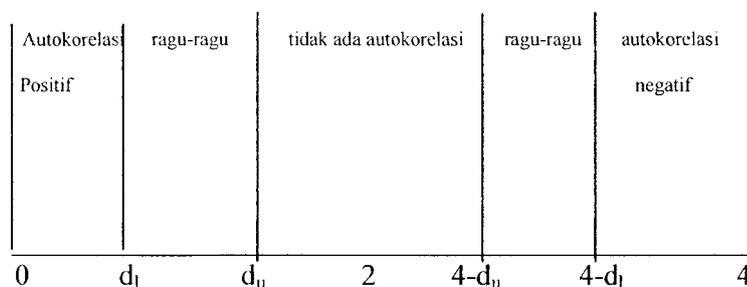
Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan (Gujarati ; 1999).

d. Pengujian asumsi klasik

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan : (Gujarati; 1999).

1. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson (DW)*, yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan dL dan dU , jika DW statistik berada diantara dU dan $4-dU$ maka tidak ada autokorelasi.



Gambar 5.1. Statistik Durbin-Watson d

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam gambar 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1. Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik	Hasil
$0 < d < d_l$	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif
$d_l \leq d \leq d_u$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_u \leq d \leq 4 - d_u$	Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_l \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif

(Agus Widarjono; 2005)

Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya auto korelasi dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau *Lagrange Multiplier*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan *lag* variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Dm + e$$

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan *lag* variabel dependen (Y) ke dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Dm + b_5Y_{(t-1)}.$$

(Gujarati ; 1999)

2. Multikolinearitas

Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) regresi awal atau yang disebut dengan metode *Klein rule of Thumbs*. Jika $r^2 < R^2$ maka tidak ada multikolinearitas.

(Gujarati ; 1999)

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

6.1.1. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, white and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier. Maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test).

Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6.1

Hasil Uji MWD

Variabel	Nilai Statistik t	Nilai Tabel t α (=5%)	Probabilitas
Z1	-0,315957	1,895	0,7612
Z2	0,190870	1,895	0,8540

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji MWD tidak ditemukan adanya perbedaan antara kedua bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier). Dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) bentuk fungsi model empiris linier bisa

digunakan untuk analisis karena Z_1 tidak signifikan sedangkan untuk loglinear juga bisa digunakan untuk analisis karena Z_2 tidak signifikan secara statistik.

6.1.2. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$\ln Y = 1,627010 + 0,077619 \ln X_1 + 0,582878 \ln X_2 + 0,396090 \ln X_3 + 0,820958 D_m$$

$$t\text{-hitung} = (0,046563) \quad (0,587669) \quad (0,121503) \quad (1,795427) \quad (1,041960)$$

$$R^2 = 0,763638$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,645457$$

$$\text{DW Statistik} = 2,807113$$

$$\text{F-Statistik} = 6,461601$$

6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. R^2 dalam regresi sebesar 0,763638. Ini berarti variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB per Kapita serta kebijakan otonomi daerah sebesar 76,36 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.1.4. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74).

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} =$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5 \%$.

Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $t\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel X_i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 6.2
HASIL UJI T-STATISTIK

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Keterangan
X1	0,077619	0,587669	1,860	Tidak Signifikan
X2	0,582878	0,121503	1,860	Tidak Signifikan
X3	0,396090	1,795427	1,860	Tidak Signifikan
Dm	0,820958	1,041960	1,860	Tidak Signifikan

1. Uji t-Statistik Variabel Jumlah Industri (β_1)

Hipotesis pengaruh variabel X_1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_1 \leq 0$, berarti variabel independen X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_1 > 0$, berarti variabel independent X_1 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_1 = 0,58766$ sedangkan t-tabel = 1,860 (df (n-k) = 8 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (0,58766 < 1,860). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah industri secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji t-Statistik Variabel Jumlah Penduduk (β_2)

Hipotesis pengaruh variabel X_2 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_2 \leq 0$, berarti variabel independen X_2 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_2 > 0$, berarti variabel independen X_2 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_2 = 0,121503$ sedangkan t-tabel = 1,860 (df (n-k) = 8 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (0,121503 < 1,860). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Uji t- Statistik Variabel PDRB per Kapita (β_3)

Hipotesis pengaruh variabel X_3 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_3 \leq 0$, berarti variabel independen X_3 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_3 > 0$, berarti variabel independen X_3 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_3 = 1,795427$ sedangkan t-tabel = 1,860 (df (n-k) = 8 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel

(1,795427 < 1,860). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Uji t- Statistik Variabel Dummy kebijakan otonomi daerah (β_4)

Hipotesis pengaruh variabel D_m terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_4 \leq 0$, berarti variabel dummy (D_m) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_4 > 0$, berarti variabel dummy (D_m) berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_4 = 1,04196$ sedangkan t-tabel = 1,860 (df (n-k) = 8 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (1,04196 < 1,860). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dummy kebijakan otonomi daerah secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6.1.5. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 81)

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

$$F\text{-tabel} = (\alpha : k-1, n-k) \alpha = 5 \% , (5-1= 4 ; 13-5 =8)$$

Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F\text{-tabel} \geq F\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
- $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah $F\text{-hitung} = 6,461601$ sedangkan $F\text{-tabel} = 3,84$ ($\alpha = 0,05 ; 3,84$), sehingga $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($6,461601 > 3,84$).

Perbandingan antara $F\text{-hitung}$ dengan $F\text{-tabel}$ yang menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, menandakan bahwa variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Jumlah Industri (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan PDRB per Kapita (X_3) serta kebijakan otonomi daerah (D_m) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.2.1. Autokorelasi.

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain.

Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat (Kuncoro, 2001, 107), apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi *Serial Correlation LM Test Lag*.

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi

- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ($\chi^2_{\text{-hitung}}$) = 11,92505 sedangkan $\chi^2_{\text{-tabel}} = 12,5916$ ($df=6, \alpha = 0,05$), sehingga $\chi^2_{\text{-hitung}} < \chi^2_{\text{-tabel}}$ (11,92505 < 12,5916). Perbandingan antara $\chi^2_{\text{-hitung}}$ dengan $\chi^2_{\text{-tabel}}$, yang menunjukkan bahwa $\chi^2_{\text{-hitung}} < \chi^2_{\text{-tabel}}$, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 6.3

HASIL UJI LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3,697871	Probability	0,228118
Obs*R-squared	11,92505	Probability	0,063662

6.2.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R \text{ square}$ (Gujarati, 1995, hal.379).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (χ^2 -hitung) = 6,590182 sedangkan χ^2 -tabel = 12,5916 (df =6 , $\alpha = 0,05$), sehingga χ^2 -hitung < χ^2 -tabel (6,590182 < 12,5916). Perbandingan antara χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel, yang menunjukkan bahwa χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas

Tabel 6.4
HASIL UJI WHITE TEST

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1,028139	Probability	0,486995
Obs*R-squared	6,590182	Probability	0,360413

6.2.3. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain.

Metode yang digunakan untuk pengujian gejala multikolinieritas adalah metode Klien dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinieritas.

TABEL 6.5
HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
X_1 dengan X_2, X_3, Dm	0,45914	0,76363	Tidak ada multikolinieritas
X_2 dengan X_1, X_3, Dm	0,96463	0,76363	Ada multikolinieritas
X_3 dengan X_1, X_2, Dm	0,66738	0,76363	Tidak ada multikolinieritas
Dm dengan X_1, X_2, X_3	0,95782	0,76363	Ada multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa terdapat multikolinieritas X_2 dengan X_1, X_3, Dm dan Dm dengan X_1, X_2, X_3 .

6.3. Penyembuhan Multikolinearitas dengan menghilangkan variabel Dummy

6.3.1. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$\ln Y = 37,09265 + 0,135976 \ln X_1 + 4,276040 \ln X_2 + 0,518707 \ln X_3$$

$$t\text{-hitung} = (4,673228) \quad (1,131403) \quad (3,780150) \quad (2,766603)$$

$$R^2 = 0,731561$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,642082$$

$$\text{DW Statistik} = 2,468361$$

$$F\text{-Statistik} = 8,175739$$

6.3.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. R^2 dalam regresi sebesar 0,731561. Ini berarti variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB sebesar 73,15 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.3.3. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74)

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} =$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5 \%$.

Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $t\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel Xi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 6.6
HASIL UJI T-STATISTIK

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Keterangan
X1	0,135976	1,131403	1,833	Tidak Signifikan
X2	4,276040	3,780150	1,833	Signifikan
X3	0,518707	2,766603	1,833	Signifikan

1. Uji t-Statistik Variabel Jumlah Industri (β_1)

Hipotesis pengaruh variabel X_1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_1 \leq 0$, berarti variabel independen X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_1 > 0$, berarti variabel independent X_1 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_1 = 1,13140$ sedangkan t-tabel = 1,833 (df (n-k) = 9, $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (1,131403 < 1,833). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah industri secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji t-Statistik Variabel Jumlah Penduduk (β_2)

Hipotesis pengaruh variabel X_2 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_2 \leq 0$, berarti variabel independen X_2 tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_2 > 0$, berarti variabel independen X_2 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_2 = 3,78015$ sedangkan t-tabel = 1,833 (df (n-k) = 9 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (3,78015 > 1,833). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk secara statistik positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Uji t- Statistik Variabel PDRB per Kapita (β_3)

Hipotesis pengaruh variabel X_3 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_3 \leq 0$, berarti variabel independen X_3 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : b_3 > 0$, berarti variabel independen X_3 berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_3 = 2,76660$ sedangkan t-tabel = 1,833 (df (n-k) = 9, $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (2,76660 > 1,833). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6.3.4. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Damodar Gujarati, 1995)

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

$$F\text{-tabel} = (\alpha : k-1, n-k) \quad \alpha = 5 \% , (4-1= 3 ; 13-4 =9)$$

Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F\text{-tabel} \geq F\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel independen secara

keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

▪ $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel independen secara

keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 8,175739 sedangkan F-tabel = 3,86 ($\alpha = 0,05 ; 3,86$), sehingga F-hitung > F-tabel ($8,175739 > 3,86$).

Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Jumlah Industri (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan PDRB (X_3) serta kebijakan otonomi daerah (Dm) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6.4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.4.1. Autokorelasi.

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain.

Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat (Kuncoro, 2001, 107), apalagi jika

sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100).

Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi

Serial Correlation LM Test Lag.

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi.

- Ho : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi
- Ha : $\rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (χ^2 -hitung) = 11,94253 sedangkan χ^2 -tabel = 12,5916 (df =6 , α = 0,05), sehingga χ^2 -hitung < χ^2 -tabel (11.94253 < 12,5916). Perbandingan antara χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel, yang menunjukkan bahwa χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 6.7

HASIL UJI LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5,646768	Probability	0,091879
Obs*R-squared	11,94253	Probability	0,063263

6.4.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R \text{ square}$ (Gujarati, 1995, hal.379).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

Hasil perhitungan yang didapat adalah $\text{Obs} * R \text{ square}$ ($\chi^2_{\text{-hitung}}$) = 4,825537 sedangkan $\chi^2_{\text{-tabel}} = 11,0705$ ($df = 5$, $\alpha = 0,05$), sehingga $\chi^2_{\text{-hitung}} < \chi^2_{\text{-tabel}}$ (4,825537 < 11,0705). Perbandingan antara $\chi^2_{\text{-hitung}}$ dengan $\chi^2_{\text{-tabel}}$, yang menunjukkan bahwa $\chi^2_{\text{-hitung}} < \chi^2_{\text{-tabel}}$, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas.

Tabel 6.8
HASIL UJI WHITE TEST

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0,826446	Probability	0,568497
Obs*R-squared	4,825537	Probability	0,437541

6.4.3. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain.

Metode yang digunakan untuk pengujian terhadap gejala multikolinieritas adalah menggunakan metode Klien dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinieritas.

TABEL 6.9
HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
X_1 dengan X_2, X_3	0,340568	0,731561	Tidak ada multikolinieritas
X_2 dengan X_1, X_3	0,357927	0,731561	Tidak ada multikolinieritas
X_3 dengan X_1, X_2	0,535097	0,731561	Tidak ada multikolinieritas

Hasil metode Klien diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolenieritas dimana seluruh nilai r^2 lebih kecil dibandingkan nilai R^2 .

6.5. Interpretasi Hasil Regresi

6.5.1. Konstanta atau Intersep

Hasil estimasi dan pengujian satu pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan ternyata tidak terdapat Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga hasil dari pengujian tersebut dapat diaplikasikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil estimasi data dalam model regresi terdapat nilai konstanta sebesar 37,09265. Nilai konstanta bertanda positif menggambarkan tingkat nilai rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Tasikmalaya berkecenderungan naik ketika variabel penjelas tetap. Interpretasi hasil penyesuaian variabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya terhadap variabel-variabel penjelasnya dengan menggunakan model regresi linier akan dijelaskan di bawah ini.

6.5.2. Jumlah Penduduk

Salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya adalah jumlah penduduk. Pada bab sebelumnya penulis telah membuat hipotesa dimana hubungan antara jumlah penduduk dengan perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya adalah positif, yang berarti bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil uji statistik, nilai koefisien jumlah penduduk adalah 4,276040. Hal ini dapat diartikan

bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen, variabel lain tidak berubah (*ceteris paribus*) mengakibatkan PAD kabupaten Tasikmalaya naik sebesar 4,276040 persen. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya mempunyai hubungan positif. Dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka akan meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dari pos-pos pendapatan asli daerah. Pos-pos tersebut misalnya, pajak daerah dan restribusi daerah. adanya peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah wajib pajak, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut akan meningkatkan jumlah pajak yang diterima yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Demikian halnya restribusi daerah, semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah restribusi yang diterima kabupaten Tasikmalaya akan semakin meningkat, dan dengan adanya peningkatan restribusi daerah tersebut maka pendapatan asli daerah kabupaten tasikmalaya akan semakin meningkat pula.

6.5.3. Produk Regional Bruto Daerah

Dalam penelitian ini penulis juga memasukkan PDRB sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Hipotesa yang dibuat untuk variabel ini sebelumnya adalah PDRB berpengaruh secara positif terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Dengan

kata lain kenaikan PDRB akan berakibat pada naiknya perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya Hasil uji statistik yang dilakukan mendukung hipotesa sebelumnya. Nilai koefisien regresi untuk variabel PDRB adalah 0,518707. Nilai tersebut mencerminkan hubungan antara PDRB dengan perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Ketika PDRB naik 1 persen, nilai pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya akan naik sebesar 0,518707 persen.

PDRB yang dapat diartikan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan sebagai tingkat kekayaan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Dengan semakin tingginya PDRB maka tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Demikian pula kemampuan mereka dalam membayar pajak, restribusi daerah juga semakin meningkat. Sehingga nantinya pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya dapat ditingkatkan.

Lampiran VI. Hasil Uji LM untuk mendeteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.697871	Probability	0.228118
Obs*R-squared	11.92505	Probability	0.063662

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 01:54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.107814	0.501180	0.215121	0.8496
LOG(X2)	2.339991	5.088649	0.459845	0.6908
LOG(X3)	-0.034241	0.354689	-0.096539	0.9319
DM	0.638247	0.757261	0.842836	0.4880
C	-17.99211	37.34147	-0.481827	0.6775
RESID(-1)	-2.165056	1.677634	-1.290541	0.3259
RESID(-2)	-3.192944	5.138310	-0.621400	0.5977
RESID(-3)	-4.193961	8.379980	-0.500474	0.6664
RESID(-4)	-3.057305	7.707799	-0.396651	0.7299
RESID(-5)	-1.084426	11.43985	-0.094794	0.9331
RESID(-6)	0.543857	6.259348	0.086887	0.9387

R-squared	0.917312	Mean dependent var	4.95E-16
Adjusted R-squared	0.503870	S.D. dependent var	0.219846
S.E. of regression	0.154851	Akaike info criterion	-1.072196
Sum squared resid	0.047958	Schwarz criterion	-0.594162
Log likelihood	17.96927	F-statistic	2.218723
Durbin-Watson stat	2.116531	Prob(F-statistic)	0.350492

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PAD kabupaten Tasikmalaya kurun waktu tahun 1992 sampai 2004, dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten Tasikmalaya.
2. Hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa PDRB per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten Tasikmalaya.

7.2. Implikasi

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan dari berbagai sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Untuk menciptakan kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, N. (2002), *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Klaten, Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin (1997), *Ekonomi Pembangunan* Bagian Penerbitan, SYIE-YKPN, Yogyakarta.
- Basri, F.H. (2002), *Perekonomian Indonesia*, UI Press Jakarta
- Biro Pusat Statistik, (1991-2004), *Statistik Indonesia*, Jakarta.
- Devas, N. (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Dwisaputra, W. (2002), *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* (suatu penelitian di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar (1995), *Econometric*, Erlangga, Jakarta.
- Haris, Syamsyuddin (editor) (2002), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Listiawan, J.A. (2001), *Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Daerah Kotamadya Yogyakarta, Tahun 1991-2000*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta.
- Subiyanto, I. (2005), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, diambil 14 Desember 2005, dari <http://www.clgi.or.id>
- Suparmoko, M. (2002), *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*, Andi. Yogyakarta.

Undang-Undang Otonomi Daerah (1999), Absolut, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Absolut, Jakarta

Widarjono, Agus (2005), *Teori dan Aplikasi Ekonometrika Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta.

Zandjani, T.C.A, (1992), *Perpajakan*, Gramedia, Jakarta.

Zulkarnain, F. (2005), Pariwisata Tasik Sedang Mencari Bentuk, diambil 14 Desember 2005, dari <http://www.pr.go.id>

**Lampiran I. Data perkembangan PAD Kab. Tasikmalaya (1992-2004),
Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB per kapita dan
Otonomi Daerah.**

Obs	Y	X1	X2	X3	DM
1992	5380.487	114	1816.054	327.963	0
1993	6572.064	104	1817.506	399.756	0
1994	7808.078	96	1820.351	888.932	0
1995	8987.081	106	1823.183	951.873	0
1996	10701.137	108	1896.546	1059.907	0
1997	11894.855	107	1905.421	2172.211	0
1998	13299.015	91	1916.615	1911.395	0
1999	13977.405	80	1919.759	1937.176	0
2000	14842.527	51	1971.014	1982.846	0
2001	25306.071	26	1535.859	663.737	1
2002	9565.733	24	1572.562	696.909	1
2003	18659.211	26	1606.711	723.234	1
2004	20568.895	23	1616.102	741.306	1

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ribu Rupiah)

X1 = Jumlah Industri (Unit)

X2 = Jumlah penduduk (Orang)

X3 = PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

Dm = Otonomi Daerah

Lampiran II. Hasil regresi linier

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:49
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.600324	5.840028	0.445259	0.6679
X2	0.904905	43.01896	0.021035	0.9837
X3	3.555924	3.844098	0.925035	0.3820
DM	10671.42	11295.61	0.944740	0.3724
C	3266.154	76868.22	0.042490	0.9671
R-squared	0.656797	Mean dependent var		12889.43
Adjusted R-squared	0.485196	S.D. dependent var		5814.996
S.E. of regression	4172.251	Akaike info criterion		19.79402
Sum squared resid	1.39E+08	Schwarz criterion		20.01131
Log likelihood	-123.6611	F-statistic		3.827460
Durbin-Watson stat	2.719133	Prob(F-statistic)		0.050324

Lampiran III. Hasil regresi log-linier

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:50
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.077619	0.132079	0.587669	0.5730
LOG(X2)	0.582878	4.797226	0.121503	0.9063
LOG(X3)	0.396090	0.220610	1.795427	0.1103
DM	0.820958	0.787897	1.041960	0.3279
C	1.627010	34.94212	0.046563	0.9640
R-squared	0.763638	Mean dependent var		9.371216
Adjusted R-squared	0.645457	S.D. dependent var		0.452198
S.E. of regression	0.269255	Akaike info criterion		0.497405
Sum squared resid	0.579985	Schwarz criterion		0.714693
Log likelihood	1.766870	F-statistic		6.461601
Durbin-Watson stat	2.807113	Prob(F-statistic)		0.012655

Lampiran IV. Hasil uji MWD dengan model linier

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:52
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.870024	6.257697	0.458639	0.6604
X2	-4.689017	48.97678	-0.095740	0.9264
X3	3.540578	4.080809	0.867617	0.4144
DM	9649.995	12418.49	0.777067	0.4626
Z1	-11909.94	37694.82	-0.315957	0.7612
C	13791.58	88134.11	0.156484	0.8801
R-squared	0.661623	Mean dependent var	12889.43	
Adjusted R-squared	0.419925	S.D. dependent var	5814.996	
S.E. of regression	4428.855	Akaike info criterion	19.93371	
Sum squared resid	1.37E+08	Schwarz criterion	20.19445	
Log likelihood	-123.5691	F-statistic	2.737397	
Durbin-Watson stat	2.743322	Prob(F-statistic)	0.110894	

Lampiran V. Hasil uji MWD dengan model log linier

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:52
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.083044	0.143672	0.578011	0.5814
LOG(X2)	0.085947	5.739610	0.014974	0.9885
LOG(X3)	0.396291	0.235233	1.684672	0.1359
DM	0.790538	0.855097	0.924501	0.3860
Z2	5.30E-05	0.000278	0.190870	0.8540
C	5.343164	42.03824	0.127102	0.9024
R-squared	0.764862	Mean dependent var	9.371216	
Adjusted R-squared	0.596906	S.D. dependent var	0.452198	
S.E. of regression	0.287099	Akaike info criterion	0.646060	
Sum squared resid	0.576982	Schwarz criterion	0.906806	
Log likelihood	1.800611	F-statistic	4.553947	
Durbin-Watson stat	2.830898	Prob(F-statistic)	0.036172	

Lampiran VI. Hasil Uji LM untuk mendeteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.697871	Probability	0.228118
Obs*R-squared	11.92505	Probability	0.063662

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 01:54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.107814	0.501180	0.215121	0.8496
LOG(X2)	2.339991	5.088649	0.459845	0.6908
LOG(X3)	-0.034241	0.354689	-0.096539	0.9319
DM	0.638247	0.757261	0.842836	0.4880
C	-17.99211	37.34147	-0.481827	0.6775
RESID(-1)	-2.165056	1.677634	-1.290541	0.3259
RESID(-2)	-3.192944	5.138310	-0.621400	0.5977
RESID(-3)	-4.193961	8.379980	-0.500474	0.6664
RESID(-4)	-3.057305	7.707799	-0.396651	0.7299
RESID(-5)	-1.084426	11.43985	-0.094794	0.9331
RESID(-6)	0.543857	6.259348	0.086887	0.9387
R-squared	0.917312	Mean dependent var	4.95E-16	
Adjusted R-squared	0.503870	S.D. dependent var	0.219846	
S.E. of regression	0.154851	Akaike info criterion	-1.072196	
Sum squared resid	0.047958	Schwarz criterion	-0.594162	
Log likelihood	17.96927	F-statistic	2.218723	
Durbin-Watson stat	2.116531	Prob(F-statistic)	0.350492	

Lampiran VII. Hasil Uji White untuk mendeteksi heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.028139	Probability	0.486995
Obs*R-squared	6.590182	Probability	0.360413

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 01:54

Sample: 1992 2004

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.84814	15.88529	1.123564	0.3041
LOG(X1)	1.125227	1.766845	0.636857	0.5477
(LOG(X1))^2	-0.097463	0.154776	-0.629703	0.5521
LOG(X2)	-2.736467	2.146724	-1.274717	0.2495
LOG(X3)	-0.191932	1.500036	-0.127951	0.9024
(LOG(X3))^2	0.019853	0.112715	0.176138	0.8660
DM	-0.390972	0.441091	-0.886376	0.4095
R-squared	0.506937	Mean dependent var	0.044614	
Adjusted R-squared	0.013874	S.D. dependent var	0.101920	
S.E. of regression	0.101211	Akaike info criterion	-1.439489	
Sum squared resid	0.061462	Schwarz criterion	-1.135286	
Log likelihood	16.35668	F-statistic	1.028139	
Durbin-Watson stat	2.793976	Prob(F-statistic)	0.486995	

Lampiran VIII. untuk mendeteksi multikolinearitas

Dependent Variable: LOG(X1)

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 01:55

Sample: 1992 2004

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X2)	12.75773	11.33553	1.125464	0.2895
LOG(X3)	0.363286	0.543436	0.668499	0.5206
DM	2.529592	1.800820	1.404689	0.1937
C	-93.38551	82.50818	-1.131833	0.2870
R-squared	0.459145	Mean dependent var	5.364299	
Adjusted R-squared	0.278860	S.D. dependent var	0.800200	
S.E. of regression	0.679530	Akaike info criterion	2.312828	
Sum squared resid	4.155845	Schwarz criterion	2.486659	
Log likelihood	-11.03338	F-statistic	2.546772	
Durbin-Watson stat	1.461248	Prob(F-statistic)	0.121244	

Dependent Variable: LOG(X2)

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 01:56

Sample: 1992 2004

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.009671	0.008593	1.125464	0.2895
LOG(X3)	0.029269	0.011823	2.475539	0.0352
DM	-0.159653	0.012848	-12.42609	0.0000
C	7.281141	0.065801	110.6548	0.0000
R-squared	0.964637	Mean dependent var	7.484355	
Adjusted R-squared	0.952849	S.D. dependent var	0.086160	
S.E. of regression	0.018709	Akaike info criterion	-4.871959	
Sum squared resid	0.003150	Schwarz criterion	-4.698128	
Log likelihood	35.66773	F-statistic	81.83335	
Durbin-Watson stat	2.107996	Prob(F-statistic)	0.000001	

Dependent Variable: LOG(X3)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:56
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.130216	0.194788	0.668499	0.5206
LOG(X2)	13.84009	5.590739	2.475539	0.0352
DM	1.905098	1.006964	1.891923	0.0911
C	-98.02000	41.47147	-2.363553	0.0424
R-squared	0.667382	Mean dependent var	6.848861	
Adjusted R-squared	0.556509	S.D. dependent var	0.610905	
S.E. of regression	0.406833	Akaike info criterion	1.286831	
Sum squared resid	1.489616	Schwarz criterion	1.460661	
Log likelihood	-4.364401	F-statistic	6.019357	
Durbin-Watson stat	1.369942	Prob(F-statistic)	0.015571	

Dependent Variable: DM
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:57
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.071085	0.050606	1.404689	0.1937
LOG(X2)	-5.918599	0.476304	-12.42609	0.0000
LOG(X3)	0.149359	0.078945	1.891923	0.0911
C	43.20033	3.342124	12.92601	0.0000
R-squared	0.957828	Mean dependent var	0.307692	
Adjusted R-squared	0.943770	S.D. dependent var	0.480384	
S.E. of regression	0.113913	Akaike info criterion	-1.259108	
Sum squared resid	0.116785	Schwarz criterion	-1.085277	
Log likelihood	12.18420	F-statistic	68.13658	
Durbin-Watson stat	1.820342	Prob(F-statistic)	0.000002	

Lampiran IX. Hasil regresi linier

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 01:59
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	3.855428	5.652857	0.682032	0.5124
X2	38.42566	10.77400	3.566517	0.0061
X3	5.788987	3.013364	1.921104	0.0869
C	73938.49	17579.24	4.206011	0.0023
R-squared	0.618507	Mean dependent var		12889.43
Adjusted R-squared	0.491343	S.D. dependent var		5814.996
S.E. of regression	4147.266	Akaike info criterion		19.74595
Sum squared resid	1.55E+08	Schwarz criterion		19.91978
Log likelihood	-124.3486	F-statistic		4.863847
Durbin-Watson stat	2.458726	Prob(F-statistic)		0.028045

Lampiran X. Hasil regresi log-linier

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 02:00
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.135976	0.120184	1.131403	0.2871
LOG(X2)	4.276040	1.131183	3.780150	0.0043
LOG(X3)	0.518707	0.187489	2.766603	0.0219
C	37.09265	7.937265	4.673228	0.0012
R-squared	0.731561	Mean dependent var		9.371216
Adjusted R-squared	0.642082	S.D. dependent var		0.452198
S.E. of regression	0.270533	Akaike info criterion		0.470817
Sum squared resid	0.658694	Schwarz criterion		0.644647
Log likelihood	0.939692	F-statistic		8.175739
Durbin-Watson stat	2.468361	Prob(F-statistic)		0.006146

Lampiran XI. Hasil Uji LM untuk mendeteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.646768	Probability	0.091879
Obs*R-squared	11.94253	Probability	0.063263

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 02:01

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.171552	0.144119	1.190347	0.3195
LOG(X2)	-1.257888	0.893931	-1.407143	0.2541
LOG(X3)	-0.214268	0.193141	-1.109382	0.3482
C	9.822890	7.014112	1.400447	0.2559
RESID(-1)	-1.643136	0.756671	-2.171534	0.1183
RESID(-2)	-2.695417	1.299849	-2.073639	0.1298
RESID(-3)	-3.371560	2.095546	-1.608917	0.2060
RESID(-4)	-2.180629	1.682788	-1.295843	0.2857
RESID(-5)	-1.946082	2.160688	-0.900677	0.4341
RESID(-6)	-1.188921	1.569208	-0.757657	0.5037
R-squared	0.918656	Mean dependent var	-2.73E-15	
Adjusted R-squared	0.674626	S.D. dependent var	0.234289	
S.E. of regression	0.133642	Akaike info criterion	-1.115180	
Sum squared resid	0.053581	Schwarz criterion	-0.680604	
Log likelihood	17.24867	F-statistic	3.764512	
Durbin-Watson stat	2.675435	Prob(F-statistic)	0.151455	

Lampiran XII. Hasil Uji White untuk mendeteksi heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.826446	Probability	0.568497
Obs*R-squared	4.825537	Probability	0.437541

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/08/06 Time: 02:01

Sample: 1992 2004

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.516858	11.67038	0.215662	0.8354
LOG(X1)	0.287116	1.140592	0.251726	0.8085
(LOG(X1))^2	-0.025046	0.101120	-0.247682	0.8115
LOG(X2)	-0.557462	0.817774	-0.681683	0.5174
LOG(X3)	0.247723	1.444141	0.171537	0.8687
(LOG(X3))^2	-0.016830	0.108931	-0.154500	0.8816
R-squared	0.371195	Mean dependent var	0.050669	
Adjusted R-squared	-0.077951	S.D. dependent var	0.094628	
S.E. of regression	0.098247	Akaike info criterion	-1.498629	
Sum squared resid	0.067567	Schwarz criterion	-1.237883	
Log likelihood	15.74109	F-statistic	0.826446	
Durbin-Watson stat	2.952804	Prob(F-statistic)	0.568497	

Lampiran IX. untuk mendeteksi multikolinieritas

Dependent Variable: LOG(X1)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 02:04
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X2)	-2.699285	2.851339	-0.946673	0.3661
LOG(X3)	0.903581	0.402143	2.246917	0.0484
C	19.37821	19.96525	0.970597	0.3546
R-squared	0.340568	Mean dependent var	5.364299	
Adjusted R-squared	0.208682	S.D. dependent var	0.800200	
S.E. of regression	0.711826	Akaike info criterion	2.357209	
Sum squared resid	5.066969	Schwarz criterion	2.487582	
Log likelihood	-12.32186	F-statistic	2.582287	
Durbin-Watson stat	1.308031	Prob(F-statistic)	0.124695	

Dependent Variable: LOG(X2)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 02:05
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	-0.030470	0.032187	-0.946673	0.3661
LOG(X3)	0.098473	0.042160	2.335696	0.0416
C	6.973378	0.246428	28.29781	0.0000
R-squared	0.357927	Mean dependent var	7.484355	
Adjusted R-squared	0.229512	S.D. dependent var	0.086160	
S.E. of regression	0.075629	Akaike info criterion	-2.126781	
Sum squared resid	0.057197	Schwarz criterion	-1.996409	
Log likelihood	16.82408	F-statistic	2.787274	
Durbin-Watson stat	0.807252	Prob(F-statistic)	0.109125	

Dependent Variable: LOG(X3)
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 02:06
 Sample: 1992 2004
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.371287	0.165243	2.246917	0.0484
LOG(X2)	3.584533	1.534674	2.335696	0.0416
C	-21.97075	11.44336	-1.919955	0.0838
R-squared	0.535097	Mean dependent var	6.848861	
Adjusted R-squared	0.442117	S.D. dependent var	0.610905	
S.E. of regression	0.456295	Akaike info criterion	1.467818	
Sum squared resid	2.082049	Schwarz criterion	1.598191	
Log likelihood	-6.540820	F-statistic	5.754937	
Durbin-Watson stat	1.028469	Prob(F-statistic)	0.021718	